

KATA PENGANTAR

EDISI REVISI

Buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang ada di tangan pembaca sekarang ini adalah sebuah edisi revisi (penyempurnaan) dari buku dengan judul sama yang telah dicetak ulang sebanyak tiga puluh kali. Buku yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiardjo (almarhumah) ini telah berkembang menjadi buku pegangan utama bagi setiap mahasiswa Indonesia yang mempelajari ilmu politik. Buku ini juga banyak digunakan oleh warga masyarakat lainnya yang ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai ilmu politik. Karena itu, merupakan suatu kehormatan besar bagi kami, murid-murid Ibu, diberi kepercayaan oleh keluarga beliau untuk membantu penyelesaian proses revisi buku ini.

Membicarakan buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, tentu kita tidak bisa melepaskan diri baik dari figur penulisnya maupun dari konteks ilmu politik sebagai kajian ilmiah dan praktik politik yang secara empirik diterapkan di Indonesia dari sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini.

Ibu Miriam Budiardjo dikenal tidak saja sebagai ilmuwan politik paling senior di Indonesia, tetapi juga sebagai pejuang politik yang ikut aktif sejak masa revolusi. Pengalaman hidupnya sungguh lengkap dengan karier yang mengesankan. Beliau dikenal sebagai diplomat yang pernah bertugas di India dan Amerika di awal tahun 1950-an, sebagai dosen, hingga sebagai aktivis yang berperan penting dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Beliau banyak terlibat aktif dalam sejumlah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia baik pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru maupun masa Reformasi.

Saat kita membaca tulisan dalam buku ini, terutama bab-bab yang telah direvisi cukup substantif oleh Ibu Miriam, kita segera mengetahui bahwa perhatian khusus Ibu Miriam tertuju pada tema-tema tentang hak asasi manusia, partisipasi politik dan partai politik, lembaga legislatif, sistem pemilu, undang-undang dasar, serta konsep-konsep dan pendekatan baru dalam ilmu politik. Dalam membahas persoalan yang menjadi minat dan perhatian khususnya, Ibu Miriam sering kali menggabungkan gagasan akademik yang berbasis pada studi politik dengan pengalaman empiriknya sebagai pelaku.

Tulisannya mengenai hak asasi manusia, misalnya, dengan jelas menggambarkan ramuan tersebut. Pengalaman Ibu Miriam sebagai Wakil Ketua Komnas HAM (1993-1998) dan penasihat Komnas HAM (1998-2002), tidak pelak mewarnai tulisan panjang yang disajikan dalam bagian ini. Ibu Miriam tidak saja membahas tentang perkembangan hak asasi manusia dalam konsep asalnya, "Konsep Barat" yang mengutamakan kebebasan, tetapi juga mengingatkan kita pada kewajiban dan tanggung jawab negara-negara dunia ketiga yang harus diemban. Pengalaman empirik situasi HAM Universal di abad 21 dengan situasi HAM di Indonesia sejak masa Demokrasi Parlementer sampai rumusan HAM hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga dibahas dengan terperinci. Di dalam semua tulisan Ibu Miriam, ciri khas argumen yang disampaikan adalah untuk mencari "keseimbangan" di antara berbagai spektrum pandangan yang berkembang dalam wacana ini.

Upaya Ibu Miriam mencari formula keseimbangan dan pilihan pada perubahan yang tidak ekstrem juga terlihat pada tulisannya mengenai sistem Pemilu. Sebagai ilmuwan politik, Ibu Miriam paham betul mengenai beragam teori sistem pemilu yang dikenal beserta kelemahan dan kelebihanannya. Mengenai penerapan sistem Pemilu di Indonesia, Ibu Miriam secara saksama mengikuti perkembangannya sejak Pemilu 1955, Pemilu di masa Orde Baru hingga Pemilu masa Reformasi. Reformasi membuka peluang luas untuk mendiskusikan sekaligus melakukan beragam eksperimen untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis di Indonesia.

Ibu Miriam adalah peserta aktif dalam diskusi panjang bagi upaya pembenahan pranata politik di Indonesia. Pada masa Reformasi, ia terlibat langsung sebagai anggota Tim 11 (Tim Persiapan Komisi Pemilihan Umum yang bertugas sejak Februari hingga Maret 1999). Selanjutnya, beliau juga men-

jadi anggota aktif Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu yang bertugas sejak Maret hingga Oktober 1999). Dengan pengalaman lengkapnya sebagai pelaksana Pemilu di Indonesia, Ibu Miriam mengambil sikap untuk tidak tergesa-gesa melakukan eksperimen perubahan yang ekstrem karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang tengah dibangun. Karena itu, di masa reformasi, di kala banyak kalangan menyuarakan keinginan untuk menerapkan sistem distrik (*single member constituency*) dalam perubahan sistem Pemilu, Ibu Miriam berpendirian untuk tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional walaupun harus disempurnakan.

Masalah lain yang juga menjadi perhatian khusus Ibu Miriam adalah soal perempuan dan politik. Dalam buku edisi revisi ini, masalah perempuan dan politik tersebar di banyak bab, misalnya bab tentang HAM, tentang UUD, dan tentang lembaga legislatif. Ibu Miriam sebagai ilmuwan politik perempuan, yang juga aktor penting pada beragam institusi pengambilan kebijakan strategis di negeri ini, merupakan *role model* yang sangat langka. Disadarinya bahwa, peran dan akses perempuan di dunia politik Indonesia pada umumnya masih sangat terbatas. Data yang ada menunjukkan bahwa ruang gerak perempuan untuk bisa duduk sebagai pengambil kebijakan politik di lembaga politik formal maupun informal masih sangat sempit. Berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak-hak politik perempuan masih banyak dijumpai.

Keprihatinan ini disikapi dengan caranya yang khas. Ia menyadari tidak mungkin perempuan bisa ikut aktif berpolitik jika tidak memiliki basis pendidikan yang baik. Perjuangan melalui jalur pendidikan tinggi dicoba dilakukan dengan terobosan membuka kuliah "Perempuan dan Politik" di Program Pascasarjana Kajian Wanita, Universitas Indonesia di tahun 1990-an. Bersama para pionir ilmuwan perempuan yang tidak banyak di negeri ini, di antaranya Prof. Saparinah Sadli dan Prof. T.O. Ihromi, Ibu Miriam mulai menggalang mantan mahasiswinya untuk terlibat aktif mengasuh dan mengembangkan perkuliahan ini. Saat ini kuliah "Perempuan, Politik, dan Kebijakan" adalah mata kuliah yang statusnya telah meningkat dari mata kuliah pilihan menjadi mata kuliah wajib di Program Pascasarjana Kajian Wanita UI. Ibu Miriam berkeyakinan bahwa peningkatan pendidikan perempuan di jenjang perguruan tinggi akan dengan sendirinya memacu partisipasi aktif perempuan di bidang politik.

Selain aktif di jalur akademik, Ibu Miriam juga menjadi inspirator bagi banyak perempuan yang bergiat di jalur advokasi melalui organisasi dan gerakan perempuan. Hal ini beliau lakukan untuk mendorong pemajuan perempuan melalui instrumen hukum internasional dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam buku ini, Ibu Miriam menyebutkan tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, *Vienna Declaration and Programme of Action*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Convention on the Political Rights of Women*, dan *Protocol CEDAW* sebagai instrumen internasional yang strategis untuk memperjuangkan perbaikan kondisi perempuan di Indonesia. Tentu saja hal ini hanya akan dicapai melalui pelaksanaan serius ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi dan deklarasi tersebut. Selain instrumen internasional, Ibu Miriam juga mencatat produk legislasi di tingkat nasional yang bertujuan memberi jaminan bagi partisipasi aktif perempuan di bidang politik dan jaminan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Ibu Miriam menyadari sepenuhnya bahwa banyak kendala kultural yang masih harus dihadapi perempuan Indonesia untuk bisa berperan aktif di pentas politik. Jika perempuan ingin melakukan perubahan terhadap nasib perempuan atau kelompok masyarakat lainnya yang masih tertinggal, maka tidak ada jalan lain selain mereka sendiri harus ikut aktif memengaruhi kebijakan di semua bidang di berbagai institusi untuk perubahan nasib mereka.

Pada saat membaca buku ini, pembaca akan melihat perbedaan signifikan antara edisi lama dan edisi revisi. Bukan hanya dalam hal tampilan, tetapi juga struktur isi buku ini. Dalam struktur isi buku, Tim Revisi melakukan beberapa penyesuaian dengan alasan 1) keseimbangan isi antarbab; 2) variasi substansi, di mana ada bab yang telah diperbarui secara signifikan dan ada bab yang belum sempat diperbaiki; dan 3) perlunya alur penyusunan bab yang disusun mulai dari materi konseptual menuju materi empirik.

Berlandaskan ketiga pertimbangan tersebut terdapat bab-bab baru dan bab-bab gabungan. Bab-bab baru tersebut adalah Bab III: *Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik*, Bab X: *Partisipasi Politik*, dan Bab XII: *Sistem Pemilu*. Sedangkan bab-bab yang merupakan bab gabungan adalah Bab I: *Sifat, Arti, dan Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya*, Bab VIII: *Pembagian Kekuasaan Negara secara Vertikal dan Horisontal*, dan Bab IX: *Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*.

Selain kedua perubahan tersebut, juga terdapat perubahan judul bab yang disesuaikan dengan perkembangan terkini, yaitu Bab V yang semula berjudul "Komunisme dan Istilah Demokrasi dalam Terminologi Komunis" diubah menjadi "Komunisme, Demokrasi Menurut Terminologi Komunis dan Perkembangan Post-Komunisme".

Dengan tetap mempertahankan bobot ilmiah yang terkandung dalam buku ini, kami sebagai Tim Revisi berharap penyuntingan dan perbaikan yang dilakukan ini akan menjadikan buku ini lebih enak dibaca oleh banyak kalangan yang ingin mempelajari ilmu politik beserta implementasinya. Kami menerima komentar, kritik dan saran konstruktif dari semua khalayak pembaca dengan mengirimkan *e-mail* ke saranrevisi@yahoo.com untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.

Jakarta, akhir Agustus 2007

Tim Revisi Buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*

Prof. Dr. Maswadi Rauf

Dra. Ani W. Soetjipto M.A.

Drs. Nur Iman Soebono, M.Hum.

Dra. Riaty Raffiudin, M.A.